

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023

Waktu : 11.00-selesai Wita

Tempat : Ruangan Departemen Ilmu Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Hasanuddin

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Makassar

Tahun 1968-1986



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Oleh

MUH IRFAN

Nomor Pokok : F061171005

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

SKRIPSI
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA MAKASSAR
TAHUN 1968-1986

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. IRFAN
F061171005

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 16 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010

[Handwritten Signature]

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011 011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Kamis, 16 Februari 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA MAKASSAR TAHUN
1968-1986**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Februari 2023



1. Dr. Nahdia Nur, M.Hum.

Ketua

2. Nasihin, M.A.

Sekretaris

3. Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A.

Penguji I

4. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.

Penguji II

5. Dr. Nahdia Nur, M.Hum.

Konsultan I

6. Nasihin, M.A.

Konsultan II

PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muh. Irfan

NIM : F061171005

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata Satu (SI)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul

PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1968-1986

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarism dan dapat dibuktikan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku

Makassar, 18 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Muh. Irfan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ Program Keluarga Berencana tahun 1968-1986 ”. Dan tak lupa pula penulis haturkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan akibat keterbatasan sumber dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Karenanya besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi

penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dalam penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan penulis dapatkan, namun berkat bantuan berbagai pihak sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang Tua Penulis, Bapak **Tamrin** dan Ibu **Murniati** atas segala doa, dukungan serta perhatian yang telah tcurhakan kepada saya. Serta adikku **Miratul Hasanah** yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Bapak **Dr. Ilham, M.Hum**, serta dosen-dosen Ilmu Sejarah **Dr. Nahdia Nur, M.Hum, Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum**,

Dr. Amrullah Amir, M.Hum, Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, Dr. Bahar Akkase Teng, Lcp. M.Hum, Dr. Rasyid Rahman, M.Hum, Dias Pradadimara, M.A, Nasihin, M.A, A. Lili Evita, M.Hum, Dr. Bambang Sulisty, M.Hum serta Alm. Prof. Dr. Rasyid Asba, M.Hum dan Ibu Margrieth Moka Lappia, S.S, M.S (Alm). Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya saat berada di bangku kuliah.

3. Kedua pembimbing ku yang keren, ibu **Dr. Nahdia Nur, M.Hum,** serta Bapak **Nasihin, M.A** yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran serta nasehat-nasehat dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa beliau saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman Ilmu Sejarah 2017, **Budi, Ramin, Aldi, Rani, Ipah, Jannah, Idah, Arika, Anisa, April, Mimi, Risma, A.Alifka, Bella, Aya, Fahmi, Taufiq, Rifsan, Bayu, Ikhsan, Rustan, Vivin, Ismi, Chaca, Sasha, Yusrah, Ainun, Claudia, Ilham, jihad.** Terimakasih atas semua kisah dan dan kebersamaannya selama perkuliahan. Serta keluarga besar **Humanis KMFIB-UH** yang telah menjadi rumah dan tempat berproses. Untuk kakak-kakak dan adik-adik terimakasih atas segala proses, canda dan tawa yang telah tercipta.
5. Sahabat-sahabatku selama kuliah **Aldi, Ramin dan Budi, Rani, Ipah, Jannah, April** yang menjadi saksi kegilaanku, tempat ceritaku, tempat berkeluh kesah, yang setiap saat saya repotkan dan tentunya selalu ada.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala sekretariat Departemen Ilmu Sejarah, **Udji Usman Pati S.Sos** atas segala bantuannya kepada penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal semester hingga selesainya skripsi ini.

7. Kepada kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberikan bantuan dan pelayanan pembacaan arsip kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ucapkan terima kasih.
8. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai judul yang penulis teliti.
9. Kepada HUMANIS KMFIB UH penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam telah menjadi rumah, tempat belajar, bersosialisasi dan mencari pengalaman yang luar biasa. Kepada keluarga besar HUMANIS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala arahan dan sarannya selama penulis berlembaga di HUMANIS.
10. Kepada Hipermawa Komisariat Bola penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam telah menjadi rumah, tempat belajar, bersosialisasi dan mencari pengalaman yang luar biasa. Kepada keluarga besar Hipermawa Komisariat Bola yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala arahan dan sarannya selama penulis berlembaga di HIPERMAWA.

Penulis menyadari masih bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi penulis berharap karya ini dapat berguna bagi bangsa dan Negara dan tentunya dapat menjadi salah satu referensi dalam perkembangan dunia hiburan di Kota Makassar.

Makassar,02 Februari 2023

Muh. Irfan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II MAKASSAR DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK SEBELUM TAHUN 1968	16
2.1 Gambaran Masyarakat Kota Makassar Sebelum Tahun 1968	16
2.2 Kondisi Perekonomian Kota Makassar	25

BAB III KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KOTA MAKASSAR.....	33
3.1 Munculnya Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kota Makassar	34
3.2 Sosialisasi Program Keluarga Berencana di Kota Makassar	40
3.3 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.....	41
3.4 Perluasan Wilayah Kota Makassar.....	44
 BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA....	51
4.1 Jumlah Penduduk Pasca Dilaksanakan Program Keluarga Berencana	51
4.2 Dampak Perekonomian	58
4.3 Program Pelayanan Keluarga Berencana.....	60
4.4 Kegiatan Pengawasan PLKB	62
 BAB V KESIMPULAN.....	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	67
 LAMPIRAN.....	71

ABSTRAK

Muh Irfan, Nomor Induk Mahasiswa F061171005, Dengan Judul “Program Keluarga Berencana di Kota Makassar Tahun 1968-1986” di Bimbing Oleh Dr. Nahdia Nur, M.Hum, M. Hum, Nasihin, Ma.

Penelitian ini membahas mengenai Program Keluarga Berencana di Kota Makassar pada tahun 1968- 1986. Pada penelitian ini fokus kajian yang penulis lakukan mengenai kebijakan program keluarga berencana sehingga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar tahun 1968-1986, serta bagaimana program keluarga berencana berfungsi sebagai alat pengontrol perempuan.

Keluarga berencana merupakan suatu program yang digagas dengan tujuan mengurangi tingkat kehamilan. Upaya tersebut dapat menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam program Keluarga Berencana (KB), yang merupakan strategi potensial dalam meningkatkan akses perempuan serta transformasi budaya. Sasaran program KB lebih dominan pada perempuan. Alat-alat kontrasepsi yang ditawarkan oleh pemerintah lebih banyak digunakan oleh perempuan. Sebenarnya upaya untuk mengurangi angka kelahiran, bukan semata tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab kedua belah pihak yaitu suami dan istri, Program KB telah diyakini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kelahiran yang selanjutnya mengakibatkan penurunan jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Makassar pada tahun 1968-1986.

Kata Kunci : Keluarga Berencana, Penduduk, Kota Makassar.

ABSTRACT

Muh Irfan, Student Identification Number F061171005, With the title "Family Planning Program in Makassar City 1968-1986" Guided by Dr. Nahdia Nur, M. Hum, M. Hum, Nasihin, Ma.

This study discusses the Family Planning Program in Makassar City in 1968-1986. In this study the focus of the study that the authors conducted was on family planning program policies so that they could influence the population growth rate of Makassar City in 1968-1986, as well as how the family planning program functioned as a tool female controller.

Family planning is a program initiated with the aim of reducing pregnancy rates. These efforts can balance population growth and economic growth. Participation and empowerment of women in the Family Planning (KB) program, which is a potential strategy for increasing women's access and cultural transformation. Family planning program targets are more dominant on women. Contraceptives offered by the government are mostly used by women. In fact, efforts to reduce the birth rate are not solely the responsibility of women, but the responsibility of both parties, namely husband and wife. The family planning program is believed to have contributed to economic growth and decreased birth rates which in turn resulted in a decrease in population growth in Makassar City in 1968- 1986.

Keywords: Family Planning, Population, Makassar City.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terciptanya keluarga yang sejahtera adalah harapan setiap keluarga. Untuk mewujudkan harapan tersebut dengan memastikan kesejahteraan keluarga yang salah satu caranya memperkecil jumlah anak sehingga mereka senantiasa merasa cukup. Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah anggota keluarga yang besar akan memberikan pembagi kebutuhan yang jumlahnya lebih besar tetapi dengan nominal yang lebih sedikit. Hal ini tentu saja berbeda dengan paradigma banyak anak banyak rejeki yang untuk saat ini semakin disadari masyarakat bahwa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka meningkat sehingga mereka harus bekerja keras lagi untuk pemenuhan kebutuhan.¹

Pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan yang cukup mendasar di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan sebuah masalah yang dapat berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat. Kurang seimbangnya struktur umum penduduk Indonesia menjadi masalah utama di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi disebabkan oleh jumlah kelahiran yang tinggi dan rendahnya tingkat kematian.²

¹Nadyah, Ahmad Afif. "Gender Dalam Keluarga Berencana (Studi Kasus Partisipasi Suami Dalam Melakukan Kontrasepsi Di Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)", *Jurnal Sipakalebbi*. Vol. 4 No.1.2020, hlm. 332.

²Fitri. "Efektifitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar". Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu

Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, ada kelompok masyarakat yang bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). PKBI aktif dalam kegiatan terkait dengan program keluarga berencana (KB) pada tahun 1957. PKBI merupakan cikal bakal Program Keluarga Berencana (KB). Struktur organisasi PKBI adalah sentralisasi dan sampai saat ini masih aktif dalam mendukung program KB di Indonesia sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).³

Di pihak lain Presiden Soekarno sangat pro kelahiran, karena menganggap bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk kelanjutan pembangunan bangsa. Pada era ini, pengendalian kelahiran bukan suatu hal yang dianggap penting sehingga kebijakannya mendukung dan mendorong kelahiran. Isu tersebut dianggap mengikuti budaya Barat.⁴ Pada saat itu Indonesia tidak mempunyai kebijakan mengenai program pembatasan kelahiran. Pemerintah tidak memperhatikan dan memikirkan kesehatan reproduksi perempuan. Sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) dan Anak tergolong tinggi, dan infrastruktur sektor kesehatan juga masih belum baik, sehingga angka kelahiran per ibu melahirkan di atas lima anak.⁵

Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauuddin Makassar, 2018, hlm. 1.

³Putri, Puri Kusuma Dwi, dkk. “Kelembagaan dan Capaian Program Keluarga Berencana (KB): Dari Era Sentralisasi ke Desentralisasi”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 14 No. 1. 2019, hlm. 1

⁴*Ibid*, hlm. 2.

⁵*Ibid*, hlm. 3.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam politik KB di Indonesia. Presiden Soeharto memandang pendekatan berbeda dari era sebelumnya terhadap tubuh perempuan. Melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita, Seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan melalui media massa. Mulai banyak perempuan yang ikut menggunakan alat kontrasepsi dalam hal ini KB.

Keluarga berencana merupakan suatu program yang digagas dengan tujuan mengurangi tingkat kehamilan. Secara tidak langsung dapat membantu masyarakat berkaitan dengan kondisi fisik ibu dan anak.⁶ Upaya tersebut dapat menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.⁷ Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) merupakan unsur penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Saat ini sasaran program KB lebih dominan pada perempuan. Alat-alat kontrasepsi yang ditawarkan oleh pemerintah lebih banyak digunakan oleh perempuan, Sebenarnya upaya untuk mengurangi angka kelahiran, bukan semata tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab kedua belah pihak yaitu suami dan istri.⁸

⁶Nafesha. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu", *jurnal kesehatan komunitas*. Vol. 3 No. 1. 2021, hlm. 35.

⁷Rasidah Wahyuni Sari, Dkk. "Efektivitas Program Keluarga Berencana Implant Dalam Menekan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang", *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*. Vol.1 No.1. 2020, hlm. 71.

⁸Nadyah, Ahmad Afiif. "Gender Dalam Keluarga Berencana... *Op. Cit.*, hlm. 333.

Program Keluarga Berencana dimulai pada tahun 1968 dengan mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang kemudian berkembang menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Gerakan ini bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia.⁹

Tahun 1957 Program Keluarga Berencana masih menjadi urusan kesehatan, Belum menjadi urusan kependudukan kemudian di tetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 juni 1970. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan tingginya kematian ibu dan kebutuhan akan kesehatan reproduksi, maka Program Keluarga Berencana (KB) digunakan sebagai salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.¹⁰

Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) yang tinggi diharapkan tujuan dari Program Keluarga Berencana (KB) dapat tercapai. Salah satu indikator keberhasilan dari Program Keluarga Berencana (KB) adalah menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam Program Keluarga Berencana (KB)

⁹Nurjannah. “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar (Studi Kasus Kecamatan Tamalate Kota Makassar)”. Makassar: Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hlm.2.

¹⁰Kementerian Kesehatan RI. *Pusat Data Informasi*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI, 2014. hlm. 1.

merupakan strategi yang potensial dalam meningkatkan akses perempuan serta transformasi budaya.¹¹

Ditingkat lokal, pengenalan Program Keluarga Berencana memiliki dinamikanya sendiri, Seperti halnya di Kota Makassar yang merupakan kota yang laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Pada akhir abad ke 19 jumlah penduduknya hanya sekitar 20 ribu-an, pada tahun 1905 jumlah penduduk meningkat hingga sekitaran 26 ribu orang. Kemudian sensus penduduk yang terjadi ditahun 1930, terjadi peningkatan hingga 3 kali lipat yang jumlahnya mencapai 84 ribu orang.¹² Hingga pada tahun 1961 jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 384 ribu¹³

Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Kota Makassar terus meningkat dan terjadi ketimpangan sosial ekonomi sehingga penghasilan rendah dan kelahiran anak meningkat, keadaan dirasakan oleh masyarakat pada tahun1967. Dari ketimpangan tersebut, pada September 1967 perkumpulan KB cabang Kota Makassar mulai direncanakan. Kemudian disahkan oleh pusat Perkumpulan Keluarga Berencana (KB) pada tanggal 6 bulan 2 tahun 1968 No.DN/85/2/OD/68.¹⁴

¹¹Nandang Mulyana, Dessy Hasanah S.A. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Berencana”, *Prosiding Ks: Riset & Pkm*. Vol. 4 No. 1, hlm. 96.

¹²Dias Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar : Proses Etisasi Sebuah Kota” dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy (editor), *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta : Ombak, 2004, hlm. 188-189.

¹³*Ibid.* hlm. 194.

¹⁴Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume 1 (1926-1988). “Perkumpulan Kb:Surat Tahun 1968 Tentang Hasil Keputusan Rapat. Pertemuan Masalah KB”.

Pada tahun 1968 Program Keluarga Berencana Nasional dimulai, ditahun yang sama Perkumpulan Keluarga Berencana Cabang Kota Makassar disahkan oleh pusat. Program Keluarga Berencana pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada Tahun 1970.¹⁵ Tahun 1978 dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan pemberian penghargaan oleh Presiden kepada peserta KB dan istransi masyarakat dalam pengelolaan KB yang berupa piagam.¹⁶

Pada tanggal 8 April 1980 Presiden Soeharto telah memberikan petunjuk untuk bekerja lebih keras dalam pembangunan di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana. Tahun 1982-1983 Kotamadya Ujung Pandang diharapkan mencapai 25% pengguna KB baru, yang diharapkan dicapai sebanyak 13.692 jiwa. Tahun 1983 ada Instruksi Mentri Dalam Negeri Kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat dan Lurah Agar pencapaian peserta KB di wilayah masing-masing mencapai 37,5%.¹⁷ Tahun 1985 penilaian Kabupaten / Kotamadya

Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. No. Reg. 1825

¹⁵Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume 1 (1926-1988). “Presiden RI: Surat Keputusan Tanggal 6 Nopember 1978 Tentang Badan Koordinasi KB Nasional (BKKBN)”. Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. No. Reg. 1804

¹⁶Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume 1 (1926-1988). “An Gubernur Kepala Daerah. Peraturan I Sulawesi Selatan: Laporan 1980-1983 Tentang Aktifitas Kegiatan Keluarga Berencana (KB)”. Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. No.Reg. 1826

¹⁷Arsip Kota Madya Ujung Pandang Volume 1 (1926-1988). “Walikotamadya Kepala Daerah. Peraturan I Ujung Pandang: Surat Surat Tahun 1983-1986 Tentang Yang Berhubungan Dengan Keluarga Berencana (KB)”. Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. No. Reg. 1841

dan kelompok akseptor, Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional, penyampaian hasil2 pendataan.¹⁸ Tahun 1986 pelaporan pengendalian lapangan Keluarga Berencana dan laporan pencapaian peserta KB.¹⁹

Perkumpulan Program Keluarga Berencana Cabang Makassar yang resmi terbentuk pada tahun 1968 merupakan cikal bakal Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Makassar. Indonesia dapat dianggap berhasil ditingkat internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan angka fertalitas total dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,6 pada tahun 1997. Artinya pada tahun 1971 perempuan di Indonesia rata-rata memiliki anak 6 selama masa reproduksi. kemudian pada tahun 1997 jumlah kelahiran anak menurun hanya sekitar 3 orang.²⁰

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai program keluarga berencana, Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melihat bahwa kepadatan penduduk cukup berpengaruh terhadap sosial ekonomi, serta penelitian ini masih kurang. Maka penelitian ini berjudul

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Makassar Tahun 1968-1986

¹⁸Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume 1 (1926-1988). No.Reg. 1826, *Op. Cit.*

¹⁹Arsip kotamadya ujung pandang Volume 1 (1926-1988). "BKKBN Kotamadya Ujung Pandang: Surat Tanggal 27 Oktober 1986 Tentang Laporan Pengendalian Lapangan /Pengawasan PLKB". Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2004 No. Reg. 1828

²⁰Direktorat Bina Kesehatan Ibu. *Family flanning*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012, hlm. 16.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini tentunya memiliki sejumlah batasan masalah mengenai objek yang akan dikaji. Hal tersebut dilakukan agar penelitian dapat dijelaskan secara maksimal, sesuai dengan yang diinginkan. Batasan masalah diadakan agar dalam penelitian tidak meluas dari segi waktu maupun tempat.

Dalam penulisan skripsi ini memiliki 2 batasan, yakni batasan spasial (tempat) dan batasan temporal (waktu). Batasan spasial penelitian ini adalah Makassar karena kota ini merupakan salah satu kota yang mengalami ketimpangan sosial yang dimana pertumbuhan ekonomi sangat rendah, Sedangkan pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Adapun batasan temporal penelitian ini dimulai pada tahun 1968, dimana pada tahun terbentuknya perkumpulan keluarga berencana (KB) Cabang Makassar dan terjadinya ketimpangan sosial masyarakat. tahun 1986 merupakan batasan akhir yang diambil oleh penulis karena pada Tahun ini merupakan tahun pelaporan pengendalian lapangan Program Keluarga Berencana (KB) yang pertama kali di lakukan dan laporan pencapaian peserta KB di Kota Makassar.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Makassar tahun 1968-1986?
2. Bagaimana program Keluarga Berencana (KB) berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perempuan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Makassar tahun 1968-1986?
2. Untuk mengetahui program Keluarga Berencana (KB) berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perempuan?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian:

1. Sebagai Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai program keluarga berencanan (KB) tahun 1968-1986.
3. Diharapkan menjadi sumber pengetahuan baru mengenai kebijakan pemerintah terhadap program keluarga berencana (KB)

1.4. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian sejarah maka perlu menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara atau aturan yang sistematis yang digunakan sebagai proses untuk mendapatkan fakta dari sebuah permasalahan. Dalam metode penelitian memiliki 4 tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan, yaitu pengumpulan data, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan sejarah.

1. Pengumpulan sumber

Pada Pengumpulan sumber merupakan pengumpulan data-data sesuai dengan topik yang ditulis. Dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yang di kumpulkan berupa arsip pemerintahan Kotamadya Ujung Pandang yang ditelusuri di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Selatan yang terkait dengan penelitian. Arsip yang digunakan seperti Arsip pemerintahan kotamadya Ujung Pandang 1921-1988. Di dalam masalah kependudukan dengan nomor registrasi 1825 yang membahas tentang perkumpulan KB:surat tahun 1968 tentang hasil keputusan rapat. Pertemuan masalah KB.

Adapun Sumber sekunder yang digunakan penulis seperti buku, undang-undang, dan karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi dan lain-lain yang di telusuri di perpustakaan dan juga diakses melalui internet serta melakukan wawancara.

2. Verifikasi (kritik sumber)

Verifikasi (kritik sumber) merupakan tahapan kedua, yaitu tahap memilah sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahannya.²¹ pada tahapan ini data diolah untuk dikritik secara ekstern maupun intern. Data yang telah dikumpulkan dalam tahap ini dianalisa dan dicatat untuk melihat kredibilitasnya sebagai sumber sejarah. Pada tahapan ini

²¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm. 77.

penulis mengga bungkan dan meng-*cross check* sumber yang satu dengan sumber yang lain.²²

3. Interpretasi (penafsiran)

Interpretasi ini merupakan tahapan ke tiga, setelah pengumpulan data dan verifikasi atau kritik sumber. tahapan ini merupakan tahap mengelola dan menganalisis sumber yang telah terkumpul untuk memperoleh fakta sejarah dari sumber primer maupun sekunder kemudian memadukan hasil penafsirannya agar memperoleh sebuah kesimpulan.

4. Penulisan sejarah

Penulisan sejarah program keluarga berencana ini merupakan tahap akhir, tahap ini merupakan penulisan dari fakta-fakta sejarah yang telah diseleksi yang kemudian disusun dan ditulis secara kronologis sehingga mudah untuk dipahami dan mendapatkan hasil yang maksimal.

1.5.Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi maka diperlukan berbagai sumber seperti sumber primer maupun skunder, sebagai bahan acuan dalam penelitian agar lebih terarah dalam penulisan. Berikut identifikasi mengenai studi pustaka dan penelitian. “Program Keluarga Berencana (KB) Di Kota Makassar Pada Tahun 1968-1986”

Sumber utama penelitian ini adalah sumber-sumber arsip yang termuat dalam koleksi Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume 1(1926-1988). Di

²²Sakinah Tunufus. “Keluarga Berencana di Singapura Pada Tahun 1966-1986”, Jakarta, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 2012. hlm. 8.

dalamnya terdapat berbagai informasi. Adapun rujukan itu kita bisa lihat dalam Reg. 1804, Reg. 1825. Reg. 1826. Reg. 1827. Reg. 1828. Reg. 1841. Reg. 1836. Reg. 2177. Reg. 1546. Reg. 597.

Buku Kementerian Kesehatan RI yang berjudul Family flanning. Yang didalamnya memuat tentang pedoman sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana, upaya menuju pelayanan KB berkualitas.

Buku yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah yang ditulis oleh kuntowijoyo. Dalam buku ini menjelaskan gambaran-gambaran hal yang perlu di perhatikan dalam sebuah penulisan khususnya penulisan sejarah. Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian dan juga metode yang harus dilakukan dalam penulisan ilmiah, buku ini akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penulisan dan penelitian.

Penyeragaman dan wajah buram modernitas di Kota Makassar pada masa orde baru tulisan Ilham Daeng Makkelo.dalam tulisan ini memberikan informasi tentang pembangunan kota di Kota Makassar yang telah dirancang sejak awal orde baru. Pembangunan yang dilakukan mulai dari tata kota dan berbagai fasilitas dalam mendukung sarana dan prasarana kota seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas perkampungan, kegiatan ekonomi serta fasilitas parawisata.

Buku *Kontuinitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan* penyunting Dias Pradadimara, Muslimin A.R Effendy dalam tulisan Dias Pradadimara Dari Makassar ke Makassar : Aspek demografi dan politik proses “etnisasi” sebuah kota dalam tulisan ini memberikan gambaran tentang perluasan

Kota Makassar pada abad ke-20 selain itu juga meningkatnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang menandakan banyaknya perkembangan di dalam kota.

Re-Identitas Kota Lama Makassar tulisan Asmunandar. Di dalam tulisan ini penulis gunakan sebagai salah satu acuan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan Kota Makassar sejak masa kolonial hingga menjadi kota metropolitan. Perkembangan kota yang dimulai sejak masa kolonial terlihat dari berbagai bangunan yang telah dibangun yang kemudian terus dikembangkan hingga abad ke-20. Perkembangan modernitas di dalam kota yang semakin meningkat cenderung melupakan unsur-unsur budaya. Karenanya untuk mempertahankan identitas sebuah kota maka bangunan sejak masa kolonial harus tetap di perhatikan.

Jurnal kependudukan Indonesia yang berjudul kelembagaan dan capaian program keluarga berencana (KB): dari era sentralisasi ke desentralisasi yang ditulis oleh Puri Kusuma Dwi Putri, Aida Vitayala Hubeis, Sarwititi Sarwoprasodjo, Basita Ginting. yang di dalamnya memuat informasi tentang program keluarga berencana (KB) di Indonesia dari awal pemerintahan presiden Soekarno hingga pemerintahan presiden Joko Widodo. Tulisan ini dijadikan sebagai bahan acuan karena memuat tentang penjelasan program keluarga berencana (KB) dari era keera.

Tulisan di atas memberikan sumbangsih informasi kepada penulis mengenai program keluarga berencana secara umum dan khususnya Kota

Makassar. Selain itu, tulisan di atas juga memberikan informasi tentang kependudukan di Indonesia pada umumnya dan khususnya Kota Makassar.

Adapun dalam penelitian ini akan berfokus pada program Keluarga Berencana (KB) di Kota Makassar Tahun 1968-1986. Seperti bagaimana bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar terhadap program Keluarga Berencana dan juga dampak program keluarga berencana.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk menghasilkan sebuah tulisan yang sistematis dan kronologis maka tulisan ini akan dibagi menjadi lima Bab yang saling berkaitan. Di dalam setiap Bab memiliki beberapa sub bab.

Bab 1 merupakan bab awal yang memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan penulisan skripsi ini, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab ke dua yang akan membahas tentang gambaran demografi serta kondisi perekonomian Kota Makassar sebelum tahun 1968.

Bab III akan membahas bagaimana kebijakan terhadap program keluarga berencana (KB).

Bab IV akan membahas bagaimana dampak pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB).

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penjabaran dari bab I sampai bab IV yang kemudian di tarik sebuah kesimpulan yang merupakan

jawaban dari rumusan masalah yang telah di ajukan sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini.

BAB II
MAKASSAR DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK SEBELUM
TAHUN 1968

2.1 Gambaran Masyarakat Kota Makassar Sebelum Tahun 1968

2.1.1 Demografi Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota kolonial yang terbentuk sekitar abad ke-17 yang terletak sekitar Benteng Rotterdam. Kota Makassar merupakan kota terbesar di Indonesia timur. Letak geografis berada pada wilayah Kotamadya Makassar yang terletak di pantai selatan pulau Sulawesi Selatan.²³ Makassar sebagai kota terletak di Pantai Selatan Pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar yang berada di bagian Tenggara Benua Asia. Pulau ini terletak antara Kalimantan dibagian barat serta Kepulauan Maluku di sebelah timur dan antara kepulauan Sulu yang merupakan wilayah Negara Filipina di sebelah Utara dan Kepulauan Nusa Tenggara di bagian Selatan. Makassar diapit oleh dua buah sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.²⁴ Kota Makassar yang terkenal dengan nama Anging Mamiri, berhadapan langsung dengan Maros yang berada di sebelah timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Gowa serta bagian utara berbatasan dengan kepulauan Pangkajene.

²³Edward L. Poellingomang. *“Makassar Abad XIX”*. Jakarta : KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2016, hlm. 13.

²⁴Abdul Rasjid, Restu Gunawan *“Makassar Sebagai Kota Maritim”*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 9-10.

Pada masa kolonial pusat pemerintahan Kota Makassar berada di Benteng Somba Opu yang kemudian dipindahkan ke wilayah Benteng Rotterdam. Disinilah banyak pemukiman-pemukiman baru seperti Vlaardingen dan kampung baru utara dan selatan benteng dibentuk yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat seperti orang Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa, dan tentu saja kelompok orang Makassar dari Gowa dan sekitarnya.²⁵

Pada abad ke-20 Indonesia semakin memperlihatkan perkembangan kemodernannya setelah kota-kota besar di Indonesia diubah statusnya menjadi Gemeente.²⁶ Penduduk yang bermukim di kota-kota gemeente ini lebih banyak dihuni oleh orang Belanda.²⁷ Makassar sendiri dikukuhkan menjadi daerah otonom yang diberi nama Gemeente van Makassar pada 12 Maret 1906 dan resmi digunakan pada 1 April 1906.²⁸

Setelah Makassar resmi menjadi kota Gemeente, maka dibentuklah Dewan kota (Gemeenteraad), dengan jumlah 13 orang yang berasal Belanda, pribumi dan Timur Asing. Pada tahun 1916, dewan kota mengusulkan adanya perubahan dalam struktur pemerintahan, hal ini kemudian di setujui oleh Gubernur Jendral.

²⁵Dias Pradadimara. “Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota : Kisah Makassar” dalam Freek Colombijn, Dkk (editor), Kota Lama Kota Baru. Yogyakarta : Ombak, 2019, hlm. 238.

²⁶Asmunandar, “Re-identitas kota lama Makassar”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol. 15 (1), 2020, hlm. 2-3.

²⁷Gemeente merupakan suatu istilah dalam Bahasa Belanda yang berarti kotamadya. Pada masa pemerintahan Belanda gemeente dipimpin oleh burgemeester atau walikota.

²⁸Andi Mulya Sultani. “Perkembangan Kotamadya Ujung Pandang 1971 – 1999”, Makassar, *Skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin*, 2007, hlm. 22.

Adanya perubahan dalam struktur pemerintahan kota ini kemudian menghadirkan waliKota Makassar untuk pertama kalinya pada tahun 1918.²⁹ Walikota pertama Makassar bernama J.E. Dambrik yang memerintah dari tahun 1918 sampai 1927.³⁰

Seiring dengan perkembangannya, Bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang bermukim di Makassar didiami oleh berbagai macam suku bangsa seperti suku Mandar, Toraja, Arab, India, Jawa Banjar, Minahasa, Buton, Sangir, Ambon, Timor, Madura dan Tanimbar. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pedagang, imam, tukang buruh, pegawai, nelayan, tentara, polisi, pelayan toko, tukang kayu, tukang sepatu, tukang pangkas rambut, dan pandai emas. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan ciri khas dari suku bangsanya.³¹ Lonjakan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga hal ini mempercepat status Kota Makassar berkembang menjadi kota kosmopolitan.

Berkembangnya Kota Makassar sebagai Kota kosmopolitan menjadikan kota ini memperoleh jaringan komunikasi dan transportasi yang dapat menghubungkan ke segala penjuru dunia. Tumbuhnya pemukiman di sekitar Benteng Rotterdam menjadi awal berkembangnya berbagai macam elemen suku bangsa di Kota Makassar. Seiring dengan meningkatnya jumlah pemukiman-

²⁹Dias Pradadimara. *“Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisasi Sebuah Kota”* Dalam Dias Pradadimara, Muslimin A.R Effendy (penyunting). *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak, 2004, hlm. 188.

³⁰Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang II 1951-1987*. Makassar, 2012, hlm.1.

³¹Asmunandar, “Re-Identitas Kota Lama Makassar” Dalam *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* Vol.15 No. 1, 2020. hlm. 9.

pemukiman tersebut maka juga berdampak pada pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan. Menurut hasil sensus tahun 1930, penduduk Kota Makassar telah meningkat tiga kali lipat, jika pada tahun 1905 berkisar 26 ribu orang, maka pada tahun 1930 telah berkembang menjadi 84 ribu orang, hal ini membuat Kota Makassar menjadi kota terbesar kedua di luar pulau Jawa setelah Palembang.³²

Dalam kurun waktu tahun 1930-an hingga tahun 1942 Makassar berkembang pesat menjadi kota pelabuhan, kota dagang, pendidikan, pusat militer Belanda, pembangunan kantor pelayaran, hotel, bioskop, Bank, gudang rumah dan toko-toko. Pembangunan ini tidak hanya diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda, namun juga terdapat campur tangan dari pihak swasta seperti pembangunan bioskop dan hotel.³³

Pada 9 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan kolonial. Untuk menduduki wilayah Makassar pasukan Jepang terlebih dahulu mendarat di Malino dan sebagian lagi di Australia.³⁴ Setelah penguasaan Jepang, segala sesuatu yang berkaitan dengan Belanda dihilangkan. Bahasa Belanda dilarang untuk digunakan serta buku-buku pelajaran yang didalamnya berbahasa Belanda pun tidak boleh digunakan,

³²Dias Pradadimara. "Dari Makassar ke Makassar...". *Op. Cit*, hlm. 240.

³³Ningrum Pangestu, Politik Representasi Dan Symbolisme Perkotaan: Monumen di Kota Makassar 1930-1945. Makassar: Skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 37-38.

³⁴Abu Hamid, dkk. perkampungan di perkotaan sebagai wujud protes adaptasi sosial: kehidupan di perkampungan miskin kotamadya Ujung Pandang. Makassar: Direktorat Jenderal kebudayaan direktorat sejarah dan nilai tradisional proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah 1982/1983, hlm. 21.

penjajahan Jepang hanya terhitung dengan waktu yang singkat sekitar tiga setengah tahun, tetapi membawa banyak perubahan bagi Indonesia.³⁵

Dalam hal pemerintahan dan pembangun, fokus utama Jepang lebih mengarah kepada strategi perang. Rakyat diarahkan untuk membantu persediaan pangan yang menunjang perang tanpa adanya program kesejahteraan rakyat, Upaya ini menjadi penopang dalam perbaikan ekonomi Indonesia yang nantinya akan digunakan dalam perang Jepang serta rencana terhadap dominasi ekonomi dalam jangka Panjang bagi Asia Timur dan Tenggara.³⁶

Terbentuknya Provinsi Sulawesi yang disusul pembentukan badan pemerintahan, menempatkan Makassar sebagai pusat pemerintahan dan politik. Sulawesi merupakan salah satu dari delapan provinsi yang dibentuk pada rapat PPKI tahun 1945. Provinsi lain yang ikut terbentuk yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, Kalimantan, Sunda kecil dan Maluku.

Kegiatan pemerintahan diawali dengan terpilihnya Dr. Sam Ratulangi sebagai gubernur provinsi Sulawesi.³⁷Namun dalam pemerintahannya, Dr. Sam Ratulangi mengalami hambatan dengan munculnya tentara Sekutu dan tentara Belanda NICA. Setelah NICA menguasai Makassar Dr. Sam Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui Bersama dengan beberapa tokoh politik lainnya. Makassar

³⁵Purnawan Basundoro. *"Pengantar Sejarah Kota"*. Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 90-91.

³⁶M. C. Ricklefs, *"Sejarah Indonesia Modern 1200-2008"*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm.424.

³⁷Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Sejarah perkembangan pemerintahan departemen dalam negeri di propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang, 1991, hlm. 400.

kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan NICA. Setelah berkuasa, NICA kembali menghidupkan kekuasaan Belanda dengan negara-negara kecil yang kemudian dijadikan sebagai satu negara yang dinamakan Negara Indonesia Timur.³⁸

Sepanjang tahun 1950-an terjadi banyak pergolakan politik untuk menghilangkan NIT.³⁹ Saat itu NIT dianggap sebagai salah satu usaha Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.⁴⁰ Pada tahun 1950 banyak dari masyarakat Makassar mendukung adanya pembentukan negara kesatuan. Disisi lain terdapat pihak yang ingin mempertahankan NIT seperti bekas tentara KNIL yang dipimpin Andi Azis. Andi Azis melakukan pemberontakan melawan APRIS yang dikirim dari Jawa dan menang dalam pemberontakan tersebut. Tindakan ini dianggap melawan hukum, hingga pemerintah menumpas pasukan Andi Azis.⁴¹

Setelah NIT berhasil diburbarkan pada 1950, kondisi Makassar tidak serta merta langsung aman, KNIL yang merupakan bekas tentara kolonial masih sering

³⁸Ilham Ambo Tang. “Menolak kolonialisme. Menonton film barat di kota Makassar tahun 1950-an”, Makassar: skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 8.

³⁹Negara Indonesia Timur dibentuk setelah dilaksanakannya Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar tanggal 7-24 Desember 1946. Awalnya negara ini dinamakan Negara Indonesia Raya dan berganti nama pada 27 Desember 1946 dengan nama Negara Indonesia Timur.

⁴⁰Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. “Pengantar Historiografis”, dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay (Penyunting), *Negara dan Masyarakat di Sulawesi Selatan di Tahun-Tahun 1950-an*. Yogyakarta: Kanisius, 2014, hlm. 5.

⁴¹Ilham Ambo Tang. “Menolak Kolonialisme...”, *Op. Cit*, hlm. 9.

melakukan pemberontakan di daerah pinggiran.⁴² Pada 8 Agustus 1950 dilapangan terbang Mandai dibuat kesepakatan antara APRIS yang diwakili oleh Kolonel Kawilarang dan Mayor Jendral Scheffelaar sebagai wakil Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia. Hasil dari kesepakatan tersebut ialah seluruh anggota pasukan KNIL meninggalkan Makassar dan menyerahkan seluruh perlengkapannya kepada APRIS.

Setelah kemerdekaan, ruang dalam Kota Makassar belum sepenuhnya aman untuk beraktivitas. Pada tahun 1953-1965 muncul pemberontakan dari DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Awalnya mereka mengorganisasi diri dalam Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS, kemudian berubah menjadi Corps Tjadangan Nasional (CTN), kemudian Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya menjadi Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada tahun 1957 muncul juga kekacauan yang disebabkan oleh Permesta. Hal ini menambah semakin kacanya kondisi sosial politik dan ekonomi.⁴³

Ketika Negara Republik Indonesia telah merdeka, kekacauan bukan lagi disebabkan oleh bangsa Asing tetapi bangsa Indonesia sendiri. Di Sulawesi Selatan kekacauan yang terjadi mengakibatkan kurangnya kemajuan dalam pengembangan Kota Makassar. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dan pemerintah provinsi untuk pembangunan, dialihkan untuk membiayai keamanan dan ketertiban penduduk akibat adanya pemberontakan dari Pasukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Barulah setelah tahun 1965 usaha

⁴²Dias Pradadimara. "Negara dan Masyarakat di Sulawesi Selatan...", *Op.cit*, hlm.5.

⁴³Ilham Ambo Tang. "Menolak Kolonialisme...", *Op. Cit*, hlm. 10-15.

pengembangan dan penataan administrasi Kota Makassar mulai diaktifkan kembali.⁴⁴

Masuknya jumlah migrasi ke Kota Makassar terdapat dua gelombang yang dilakukan secara bertahap. Gelombang *pertama* terjadi pada tahun 1945-1950, Orang-orang yang melakukan perpindahan penduduk pada umumnya mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia Timur. Gelombang *kedua* terjadi pada tahun 1950 sampai pada akhir 1960-an, orang-orang yang melakukan perpindahan penduduk pada gelombang kedua ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan sendiri. Banyaknya masyarakat yang melakukan perpindahan penduduk pada gelombang pertama merupakan lebih merefleksi posisi sosial politik Kota Makassar di daerah Bagian Timur, sedangkan pada gelombang kedua diakibatkan oleh adanya ketidakpastian dan ketidakamanan yang terjadi di Pedesaan Sulawesi Selatan bersamaan dengan meluasnya operasi militer oleh TNI maupun oleh “Gerombolan”.⁴⁵

Melonjaknya jumlah penduduk di Kota Makassar pada saat itu mengakibatkan fasilitas kota yang dibangun tidak mampu menampung jumlah migrasi yang terus berdatangan. Kondisi ekonomi yang semakin buruk hingga pada tahun 1960-an membuat keadaan semakin tidak terkendali dengan baik. Hasil survey dari penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung 1973 bahwa Daerah yang pemukimannya yang layak untuk di tempati pada umumnya hanya berada di tengah kota, sedangkan daerah pinggiran kota seperti Panamu,

⁴⁴Andi Mulya Sultani. “Perkembangan Kotamadya Ujung Pandang 1971 – 1999”, *Op. Cit.*, hlm. 23-25.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 246.

Kalukubodoa, Maccini dan Barabaraya yang merupakan daerah pinggiran yang pada umumnya ditempati oleh migran.⁴⁶ Meningkatnya jumlah penduduk di dalam kota mengakibatkan penataan ruang kota tidak tertata dengan baik. Ruang kota adalah ruang yang senantiasa diperebutkan oleh berbagai pihak, hal tersebut terjadi dikarenakan terbatasnya ruang pada satu sisi serta meningkatnya jumlah orang-orang yang menyinggirkan ruang kota tersebut sebagai akibat melonjaknya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal tersebut berdampak pada penggunaan ruang kota yang terbatas serta tidak diikuti dengan kebijakan untuk membagi ruang kota secara adil dan legal.⁴⁷

Meskipun telah dilakukan penataan dalam ruang kota, tetapi mengingat Makassar yang merupakan pusat kota dimana segala aktivitas dilakukan di dalamnya serta penduduknya yang semakin tahun terus bertambah mengakibatkan wilayahnya menjadi semakin sempit. Karenanya pemerintah perlu untuk melakukan perluasan wilayah. Dengan adanya perluasan wilayah ini maka nama Makassar ikut diganti. Adapun maksud dari perubahan nama tersebut berdasar atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Makassar pada 24 September 1964 no. 29/DPRD-GR/64, yang menetapkan pergantian nama menjadi Ujung Pandang. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa Ujung Pandang merupakan nama yang digunakan oleh pahlawan Sultan Hasanuddin, nama Makassar merupakan nama yang diberikan oleh penjajah Portugis dan Belanda

⁴⁶*Ibid*, hlm. 248.

⁴⁷Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta : Ombak, 2016, hlm. 96.

dan pada umumnya penduduk Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum banyak mengenal Makassar dengan sebutan Juppandang. Wilayah Makassar akhirnya dapat diperluas pada tahun 1971.⁴⁸

2.2 Kondisi Perekonomian Kota Makassar

Perkembangan ekonomi masyarakat Kota Makassar dapat dilihat dari lapangan usaha yang ada. Kondisi ini berkembang sejak masa lampau hingga masa kini. Sejak dahulu mata pencaharian mereka di Kota Makassar umumnya meliputi: petani, nelayan, pelayaran, dan perdagangan. Pada masa Hindia Belanda (Abad-19), orang-orang Makassar sudah dapat bekerja di perusahaan Belanda sebagai kontraktor perkebunan dan pedagang industri.⁴⁹

Sejak tahun 1938 secara administratif Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Indonesia Timur.⁵⁰ Pada masa ini perkembangan ekonomi Makassar semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena ditetapkannya Makassar sebagai pusat kegiatan pada masa pemerintahan Belanda untuk wilayah Indonesia Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelabuhan Makassar semakin banyak dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Peningkatan ini terlihat dari banyaknya kegiatan ekspor komoditas yang dilakukan di pelabuhan Makassar, seperti ekspor

⁴⁸Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Sejarah perkembangan pemerintahan departemen dalam negeri di propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan. Ujung Pandang, 1991, hlm.513.

⁴⁹Ilham Ambo Tang, "Menolak Kolonialisme. Menonton Film Barat di Kota Makassar Tahun 1950-an", Makassar: Skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2014 hlm. 16.

⁵⁰Barbara Sillars Harvey, *Pemberotakan Kahar Muzakkar dari tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, hlm. 329.

komoditas Kopra.⁵¹ Tercatat sekitar 90 persen kopra yang berasal dari Kawasan Indonesia Timur yang diekspor dari pelabuhan Makassar.

Ketika masa pemerintahan Belanda, Makassar menjadi bandar niaga yang mendorong munculnya kota industri, maka setelah kemerdekaan perekonomian di Kota Makassar sulit untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan munculnya Gerakan DI/ TII tahun 1950 di pedalaman Sulawesi Selatan, kemudian muncul Gerakan Permesta tahun 1957. Akibat adanya gerakan DI/TII serta Permesta, banyak masyarakat pedalaman Sulawesi Selatan yang memilih meninggalkan sawah, ladang dan ternak mereka untuk mencari tempat yang aman. Pada pertengahan 1960-an perekonomian Makassar mengalami kemerosotan, sehingga pembangunan dalam berbagai sektor terhambat.⁵²

Pada periode 1960 hingga 1970 Kota Makassar dihadapkan dengan dua peristiwa besar dalam sejarah tanah air, yang sangat besar pengaruhnya dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yaitu : (1) berhasilnya ditumpas pemberontakan DI/TII/Kahar Muzakkar pada bulan April 1965, dan (2) terjadinya Gerakan 30 September PKI yang dapat ditumpas dalam waktu singkat oleh ABRI dan rakyat. Penyelesaian konflik politik itu sungguh sangat besar artinya dalam stabilitas dan dinamika pembangunan bangsa. Seperti halnya bagi pemerintahan

⁵¹A. Rasyid Asba, "*Kopra Makassar Perebutan Pusat Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 184.

⁵²Muh. Ali Hannapia, "Makassar di bawah pemerintahan Aroepala 1960-1965". Makassar: Skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm.19.

rakyat Kota Makassar, sudah dapat lebih mencurahkan perhatiannya terhadap pembangunan daerahnya.

Sebagai suatu kotamadya, Makassar tidak mempunyai banyak sumber untuk meningkatkan pendapatan, oleh karena itu, kota ini benar-benar amat tergantung pada penerimaan dari sumber-sumber pemerintahan pusat melalui pemerintah provinsi. Tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor utama juga menunjukkan kemunduran semenjak tahun 1950. Pendapatan riil perkapita dalam tahun 1966 sangat mungkin lebih rendah dari pada tahun 1938. Sektor industri yang menyumbangkan hanya sekitar 10% dari GDP dihadapkan pada masalah pengangguran kapasitas yang serius. Di awal dasawarsa tersebut defisit anggaran belanja negara mencapai 50% dari pengeluaran total negara, penerimaan ekspor sangat menurun dan selama tahun 1964-1967 hiperinflasi melanda daerah ini dengan akibat lumpuhnya perekonomian.⁵³

Dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bercita-cita mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Adanya gangguan-gangguan keamanan yang kemudian berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, juga pada perekonomian nasional sehingga menghambat pembangunan. Dalam hal ini, usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bercita-cita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan mereka dibanding kemajuan ekonomi dari kota lain.

⁵³Fitri Handayani. Legalisasi Lotto di Makassar, 1967-1969, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan*, Vol. 6 No.2, 2019, hlm. 85.

Karena itu upaya-upaya yang diperlukan untuk bersaing dengan kota-kota lain dalam hal pembangunan perlu persiapan.⁵⁴

Pertama-tama telah disiapkan perencanaan rehabilitasi dan pembangunan sebagaimana telah dikemukakan dalam “Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Makassar tahun 1965-1970” yang berisikan pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan dengan menyesuaikan dengan PELITA dan bertujuan menjadikan Kotamadya Makassar suatu Kota Dagang, Kota Budaya dan Kota Industri. Namun terhambat karena kurangnya dana pembangunan daerah yang tersedia.

Walikota Kotamadya Makassar saat itu, H.M. Dg. Patompo kemudian dihadang kendala klasik, yaitu dana. Membludaknya rencana-rencana pembangunan, menuntut kekuatan dana dan daya meteril pemerintahan pemerintah kota. Sementara pemasukan pajak daerah dengan berbagai bentuknya seperti yang diharapkan, jelas kian tak mencukupi. Bahkan, bila dipaksakan dalam konteks tertentu kerap justru memacetkan gerak pembangunan itu sendiri, sedang upacaya diversifikasi penggalian sumber keuangan belum dikenal.⁵⁵

Kondisi pemerintahan kota pada waktu itu kurang mendukung seorang walikota yang baru diangkat bisa berhasil dengan rancangan program yang besar. Kondisi kehidupan warga yang serba krisis akibat kekacauan, membawa akibat ragam dalam gerak kehidupan yang apatis. Sumber pendapatan pemerintah kota pun belum dapat diberdayakan. Patompo menganggap realitas pemerintahan kota

⁵⁴*Ibid*, hlm. 86.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 87.

serta kondisi yang menyelimuti warga tersebut, merupakan akar persoalan yang mesti dituntaskan. Bila kondisi ini dibiarkan, jelas mesin-mesin pembangunan tidak mungkin bergemuruh. Mereka tidak akan bisa mengikuti program pembangunan yang bakal dicanangkan. Apalagi untuk mengajaknya ikut secara aktif mengambil peran.⁵⁶

Pendapatan daerah terbatas pada pajakpajak dan retribusi-retribusi. Pajak-pajak daerah diperoleh dari Pajak Tontonan, yaitu pembatasan *import* film yang *notabene* juga sangat mahal, sehingga tidak memungkinkan pemutaran film yang bermutu dengan akibat kurangnya penonton sehingga otomatis menurunkan pendapatan daerah atas Pajak Tontonan. Dimana untuk meminimalisir keinginan-keinginan yang hidup dari sebagian masyarakat, penjualannya berangsur-angsur dibatasi dengan segala akibatnya. Faktor ekonomi moneter ini menyebabkan sektor pendapatan ini tidaklah dapat diharapkan.

Sehubungan dengan itu di era tahun enam puluhan, anggaran pendapatan dan belanja *alternative* belum populer. Walikota masih berkerja atas dasar peraturan *stadsgamentee* yang ketat. Maka jalan yang paling aman dan kerap ditempuh adalah membiarkan kota dalam realitas keadaan dan menyerahkan nasibnya pada keadaan itu sendiri. Pola yang didasari kebekuan cara berfikir ini, jelas tak punya tempat dalam benak Patompo. Sebagai pekerja yang tak kenal menyerah, Patompo akhirnya memutuskan untuk merintis penggalian sumber dana sendiri.⁵⁷

⁵⁶*Ibid*, hlm. 88.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 88.

Dalam pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu upaya yang harus dipenuhi sebagai landasan pembangunan di Kota Makassar, tidak hanya dibidang ekonomi tetapi juga di bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial dan kebudayaan. Apabila kita membicarakan pertumbuhan, tentunya kita memahami bahwa yang dimaksud adalah peningkatan produk nasional bruto adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dalam waktu satu tahun.⁵⁸

Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang dan modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.⁵⁹

Dalam kebijakan "Berdikari" alias berdiri di atas kaki sendiri yang dikampanyekan Presiden Soekarno membuat semua impor produk pangan dan barang distop. Impor beras dilarang pada Agustus 1964, membuat kondisi persediaan pangan nasional yang sudah sulit semakin pelik.⁶⁰ Bukan hanya itu, terjadinya penyempitan lahan pertanian semakin meluas kecuali pada lahan yang difungsikan untuk bercocok tanam secara ladang. Mayoritas pengalih fungsian

⁵⁸Suparmoko. *“Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah”*. Andi: Yogyakarta, 2002. hlm. 301.

⁵⁹Sadano Sukirno, *“Mikro Ekonomi Teori Pengantar”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. hlm. 28.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 9.

lahan sektor pertanian digunakan untuk keperluan pembukaan lahan pemukiman akibat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Persoalan utama yang menyebabkan tingginya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian adalah faktor kesejahteraan petani. Lahan- lahan pertanian dijual oleh pemiliknya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶¹

Aspek-aspek tersebut yang melatarbelakangi situasi ekonomi yang mencapai hiperinflasi sehingga menyebabkan defisit anggaran negara ditambah lagi dengan adanya gangguan keamanan menyebabkan masyarakat tidak leluasa untuk mencari nafkah sementara diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kota Makassar selama tahun 1960-1970 tahun merdeka tidak kurang dari 80%. Mengingat Makassar adalah daerah transit dari berbagai daerah Indonesia bagian timur, keadaan ribuan buruh pelabuhan yang menganggur dapat memberi sedikit gambaran tentang melemahnya aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian yang secara otomatis berpengaruh pada perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai buruh.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa buruknya perekonomian di Kota Makassar selama pemerintahan Orde Lama (terutama) selain disebabkan oleh peperangan yang terjadi di pedesaan juga disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non- fisik, selama pendudukan Jepang, Perang Dunia II dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri

⁶¹Tity Wahyu Setiawati. Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global, *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Vol.26 No.3, hlm. 585.

(termasuk sejumlah pemberontakan di daerah) ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut.